***Good Governance* terhadap Layanan Administratif di Pengadilan Agama Blitar Perspektif Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan**

Hanadi Zahrotun Nisak

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

hanadizahrotun@gmail.com

Abstrak:

Pelayanan yang efisien sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara yang semakin meningkat di Pengadilan Agama Blitar. Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas merupakan salah satu ciri *good governance*. Untuk itu, aparatur negara harus melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien, karena diharapkan dengan penerapan *good governance* dapat mengembalikan dan membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Penerapan prinsip *good governance* sangat penting dalam pelaksanaan pelayanan Pengadilan Agama yang baik dan bermutu tentunya akan menciptakan rasa kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan dalam memutus setiap perkara mereka. Dengan hadirnya kriteria Pemerintahan yang Baik yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Asas, Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan, akan diketahui apakah program tersebut benar-benar diterapkan dan dirasakan manfaatnya oleh para pihak maupun staf Pengadilan atau hanya bersifat dokumentasi tanpa adanya pengaruh yang berarti. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *good governance* di Pengadilan Agama Blitar ditinjau dari aspek Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan. Jenis Penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan penerapan *good governance* di Pengadilan Agama Blitar, telah memenuhi Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Ditinjau dari aspek Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan yakni layanan administratif di Pengadilan Agama Blitar telah sesuai dengan UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dari hal ini terdapat korelasi dengan diterapkannya *good governance* di Pengadilan Agama Blitar dapat dipahami secara luas maka asas peradilan akan tercapai, dilihat dari korelasi keduanya yang sama-sama ingin memberikan pelayanan yang optimal.

Kata Kunci: *good governance*; pelayanan; asas peradilan

Pendahuluan

Istilah *good governance* telah diperkenalkan oleh beberapa lembaga Internasional seperti UNDP dan World Bank. Popularitas terminologi ini mencuat di kalangan pemerintah, akademisi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat sejalan dengan pemberian bantuan yang diarahkan pada pengembangan *good governance*. Di Indonesia Istilah *good governance* mulai dikenal sekitar tahun 1996 yakni menjelang berlangsungnya

reformasi politik.¹ Pada era tersebut terjadi perombakan sistem pemerintahan yang menuntut proses demokrasi yang bersih sehingga *good governance* merupakan salah satu alat reformasi yang mutlak diterapkan. *Good governance* menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memiliki asas-asas yang meliputi kepastian hukum, kemanfaatan, ketidak berpihakan, kecermatan, tidak menyalah gunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik.

Terlaksananya pemerintahan yang baik (*Good Gavernance*) adalah merupakan prasyarat bagi pemerintah dalam upaya mewujudkan cita-cita masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Hal ini sejalan gerakan internasional *Open Government Partnership*. Setelah Amerika Serikat dan Brazil, kini Indonesia menjadi *Co-Chairs Open Government Partnership* (OGP 2012-2014).² Lembaga Peradilan Agama sendiri yang merupakan organisasi pemerintah berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung sebagai lembaga yang memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, dalam menangani perkara diperlukan perubahan paradigma berfikir hingga penataan administrasi peradilan sehingga pengguna jasa pengadilan dapat merasakan kemudahan dan percepatan dengan tetap memperhatikan teknis penanganan perkara. Untuk Pengadilan Agama dalam tertib administrasi oleh Mahkamah Agung telah di keluarkan buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II Edisi Revisi. Dengan adanya keterbukaan ini masyarakat menjadi lebih mudah mengetahui kinerja pejabat publik. Sesungguhnya produk dari organisasi pemerintah adalah pelayanan masyarakat (*public service*). Oleh karena itu untuk membangun kepercayaan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan dalm lingkungan Mahkamah Agung RI dan badan-badan peradilan dibawahnya, serta untuk memenuhi amanat Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka Ketua Mahkamah Agung RI mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan sebagai dasar bagi setiap satuan kerja pada seluruh badan peradilan dalam memberikan pelayanan kepada publik.

Pengadilan Agama Blitar merupakan Pengadilan Agama tingkat pertama Kelas IA. Pengadilan ini memiliki wilayah yuridiksi yang mencakup wilayah kota dan Kabupaten Blitar. Tercatat sejak tahun 2017 Pengadilan Agama Blitar memutus sebanyak 4739, tahun 2018 memutus 4750 perkara, tahun 2019 memutus 5018 perkara, dan tahun 2020 terhitung sejak januari hingga 17 Maret 2020 memutus 1161 perkara.³ Banyaknya jumlah perkara yang diputus menempatkan pengadilan Agama Blitar sebagai Pengadilan Agama kelas IA.

Berdasarkan data diatas, menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Blitar memiliki banyak perkara yang masuk atau diputus bahkan terus mengalami kenaikan tiap tahunnya. Hal ini harus diimbangi dengan peningkatan pelayanan yang optimal. Peningkatan kualitas dalam pelayanan masyarakat tentunya sangat perlu diperhatikan mengingat Pengadilan Agama merupakan tempat masyarakat memprjuangkan keadilan sebagaimana mestinya. Penerapan prinsip *good governance* serta asas peradilan

¹ Agus Dwiyanto, dkk., *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008), 77.

² Ridwan Mansyur, "Pelayanan Publik", diakses 26 November 2019, https://www.mahkamahagung.go.id/assets/majalah/Majalah_MA_Edisi3/majalah/assets/basic-html/page64.html

³ Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Blitar, diakses 17 Maret 2020, https://sippa-blitar.go.id/statistik_perkara

Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan melalui pelayanan yang baik dan bermutu tentunya akan menciptakan rasa kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan dalam memutus setiap perkara mereka. Dengan hadirnya kriteria Pemerintahan yang Baik yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, akan diketahui apakah program tersebut benar-benar diterapkan dan dirasakan manfaatnya oleh para pihak atau hanya bersifat dokumentasi.

Beberapa kajian telah dilakukan terkait tema ini, seperti penelitian Bitu Gadsia Spaltani dengan judul Peran Peradilan TUN dalam Penyelenggaraan *Good Governance* Pasca UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Hasil penelitiannya bahwa lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, turut memperluas kompetensi absolut Peradilan TUN dan Peran Peradilan TUN dalam mewujudkan *good governance* pasca UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah dalam hal memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa yang menjadi kewenangannya pasca hadirnya undang-undang tersebut dengan berdasarkan pada perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam menjatuhkan putusan.⁴ Perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah peneliti terdahulu memfokuskan pada kewenangan kompetensi absolut Peradilan TUN dalam mewujudkan AUPB serta peran Peradilan TUN dalam membangun *good governance* dan menggunakan Peradilan Tata Usaha Negara sebagai subjeknya, sedangkan penelitian ini menggunakan penelitian empiris (lapangan) dan dilaksanakan di Pengadilan Agama. Keduanya memiliki sedikit persamaan dalam metode analisisnya yakni menggunakan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dalam membahas *good governance*.

Selanjutnya penelitian yang ditulis oleh A Muh Ikhsan W R dengan judul Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governanace* dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa (Studi Desa Pesse, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng). Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan prinsip kepastian hukum, dan prinsip transparansi, dalam Pemerintahan Desa serta faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut.⁵ Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian yang peneliti lakukan ialah menggunakan konsep *Good Governance* serta Lembaga Negara sebagai tempat penelitian. Namun ada sedikit perbedaan yakni penelitian terdahulu memfokuskan pada Implementasi prinsip *Good Governance* terhadap pelaksanaan pemerintah desa, sedangkan penelitian ini fokus pada layanan administratif Lembaga Peradilan Agama.

Penelitian yang ditulis oleh Anton Kurnia Mardiansyah dengan judul Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Menurut Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Fiqh Siyasah (Studi Pengadilan Agama Kalianda). Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan asas peradilan cepat, dan biaya ringan menurut Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan

⁴ Bitu Gadsia Spaltani, "Peran Peradilan TUN dalam Penyelenggaraan *Good Governance* Pasca UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan," (Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016), <http://eprints.ums.ac.id/49800/>

⁵ A Muh Ikhsan W R, "Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governanace* dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa (Studi Desa Pesse, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng)" (Undergraduate thesis Universitas Hasanuddin, 2017), <http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/6/>

pandangan Fiqh Siyasah.⁶ Perbedaan penelitian terdahulu dan sekarang ialah terdapat pada analisis Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan yang digunakan, penelitian terdahulu menggunakan Undang-Undang 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Fiqh Siyasah. Sedangkan penelitian ini menggunakan UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sedangkan persamaannya terletak pada penggunaan konsep Asas Sederhana, cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama.

Kemudian penelitian yang ditulis Delfiana Irani MS dengan judul Penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Beracara di pengadilan Negeri Kelas IB Bukittinggi. Penelitian ini membahas tentang penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam beracara di pengadilan negeri, serta mengetahui faktor penghambat dan upaya penyelesaiannya.⁷ Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu penelitian terdahulu memfokuskan pada beracara di pengadilan Negeri sedangkan penelitian ini fokus pada layanan administratif Lembaga Peradilan Agama. Sedangkan persamaannya terletak penggunaan konsep Asas Sederhana, cepat, dan Biaya Ringan. Dari semua penelitian terdahulu diatas jika dibandingkan dengan penelitian ini perbedaan yang paling terlihat yaitu pada objek dan metode analisis penelitian. Adapun penelitian yang menggunakan penerapan *good governance* dalam Pengadilan Agama terhitung masih langka, penggunaan istilah *good governance* cenderung fokus terhadap sesuatu hal yang berkaitan dengan pemerintahan saja karena jika dilihat artinya secara harfiah berarti tata pemerintahan yang baik, padahal secara maknawi *good governance* tidak hanya pemerintahan saja melainkan mencakup aspek negara/pemerintahan, swasta, dan masyarakat.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, jenis penelitian ini untuk dapat mengetahui bagaimana hukum diberlakukan atau diterapkan dalam masyarakat.⁸ Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yakni pendekatan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang.⁹ Oleh karena itu, penelitian ini menitikberatkan pada hasil pengumpulan data yang diperoleh dari narasumber atau informan yang mengetahui tentang layanan administratif di Pengadilan Agama Blitar. Lokasi penelitian yakni dilaksanakan di Kantor Pengadilan Agama Blitar yang bertempat di Jalan Imam Bonjol No.42, Sananwetan, Kec. Sananwetan, Kota Blitar. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan pihak staf Pengadilan Agama Blitar yang terdiri dari Hakim, Panitera, staf PTSP, advokat, dan para pihak berperkara di Pengadilan Agama Blitar. Kemudian, sumber data sekunder ini diperoleh dari referensi buku-buku, penelitian ilmiah, dan arsip-arsip yang mendukung dalam hal mekanisme pelaksanaan pelayanan administratif di Pengadilan Agama Blitar.

⁶ Anton Kurnia Mardiansyah, "Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Menurut Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Fiqh Siyasah (Studi Pengadilan Agama Kalianda)" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), <http://repository.radenintan.ac.id/5656/1/>

⁷ Delfiana Irani MS, "Penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Beracara di pengadilan Negeri Kelas IB Bukittinggi," (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau, 2018), <http://repository.uin-suska.ac.id/18770/>

⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 105.

⁹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), 12.

Hasil dan Pembahasan

Implementasi *Good Governance* melalui Layanan Administratif di Pengadilan Agama Blitar

Good governance merupakan prasyarat bagi pemerintah dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara agar penyelenggaraan dan pembangunan berjalan secara berdaya guna, bertanggung jawab, serta bebas dari penodaan moral dan korupsi hal ini sejalan dengan tujuan dibentuknya undang-undang Administrasi Pemerintahan. Selain untuk menjamin hak-hak dasar warga negara, UU AP juga merupakan transformasi Asas- asas Umum Pemerintahan yang Baik (selanjutnya disebut AUPB) yang selama ini telah dipraktikkan serta dikonkretkan dalam bentuk norma hukum yang mengikat. Dalam Pasal 7 Undang-Undang No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB. Oleh karena itu Pengadilan Agama selaku Badan dan atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan dalam lingkup lembaga yudikatif wajib untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan AUPB diatas.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa salah satu tujuan dari undang-undang ini adalah memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada warga masyarakat, hal ini sejalan dasar pertimbangan dalam pembentukan standar pelayanan peradilan bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap peradilan maka perlu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan di peradilan. Mengingat banyaknya perkara yang masuk maupun diputus di Pengadilan Agama Blitar maka harus pula diimbangi dengan peningkatan pelayanan yang optimal agar masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh hak sebagaimana mestinya.

Secara umum pengadilan menyediakan pelayanan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan berupa pelayanan Administrasi Persidangan, Bantuan Hukum, Pengaduan, dan Permohonan Informasi. Adapun bentuknya terdiri dari pelayanan manual (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dan elektronik (*e-court*).¹⁰

Landasan *good governance* di pengadilan agama secara umum mengikuti standar nasional yang diatur oleh MENPAN RB. Kewajiban penerapan *good governance* di Pengadilan Agama secara khusus tidak ada, namun secara umum berlaku untuk seluruh kementerian.¹¹ Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal tujuh disebutkan bahwa Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB. Pengadilan Agama selaku Badan dan atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan dalam lingkup lembaga yudikatif wajib untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan AUPB.

Penerapan unsur-unsur AUPB di Pengadilan Agama Blitar telah memenuhi kriteria seperti yang termuat dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan meliputi asas kepastian, kebermanfaatan,

¹⁰ Nur Cholis Ahwan, *Wawancara*, (Blitar, 14 April 2020).

¹¹ Taryono Reksowardoyo, *Wawancara*, (Blitar, 14 April 2020).

ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan wewenang, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik. Manfaat terkait penerapan prinsip-prinsip ini di Pengadilan Agama Blitar ialah pelayanan menjadi lebih transparan dan akuntabel. Sehingga asas peradilan tercapai dan para pihak merasa puas.¹²

Untuk mendukung *good governance* di lingkungan lembaga peradilan. Pengadilan Agama Blitar memiliki inovasi-inovasi di bidang pelayanan. Secara umum inovasi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung di lingkungan Peradilan, diantaranya *ecourt* (*elektonic court*), posbakum (pos bantuan hukum), PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu, hingga SIPP (Ssitem Informasi Penelusuran Perkara). Secara khusus Pengadilan Agama Blitar sendiri memiliki inovasi yang dilakukan diantaranya, program SIADPA PATRIA (Sistem Administrasi Penelusuran Patria) merupakan kerjasama dispenduk capil dengan Pengadilan Agama Blitar dalam pengurusan perubahan status pernikahan di KTP (Kartu Tanda Penduduk) maupun Kartu Keluarga. Inovasi ini direncanakan berlaku mulai tahun ini.¹³ Inovasi lainnya ,yakni sistem antrian kartu dimana setiap meja terdapat kartu antrian mulai dari pendaftaran hingga pengambilan produk putusan. Inovasi ini juga menyediakan kartu yang berbeda warna untuk membedakan keperluan orang datang ke pengadilan, hal ini berguna untuk memudahkan dalam efektifitas antrian. Inovasi ini mulai berlaku tahun 2018.¹⁴

Pada dasarnya pelayanan di Pengadilan Agama Blitar sudah cukup baik, mulai dari pelayanan informasi hingga pengambilan produk putusan yang cukup terarah dan tidak berbelit-belit, didukung dengan sumber daya manusianya yang cakap dan ramah. Hanya saja ada beberapa faktor penghambat dalam penerapannya, berkaitan dengan sarana untuk penunjang perlengkapan terkait aplikasi yang harus disediakan satker masing-masing, *server* perlu di *upgrade*, hingga kesiapan masyarakat dalam teknologi kurang.¹⁵ Hal ini berdampak terhadap *e-litigasi* di Pengadilan Agama Blitar yang penerapannya masih jarang, pada tahun 2019 saja hanya ada satu perkara yang menggunakan *e-litigasi* yakni perkara dispensasi nikah. Pasalnya masyarakat lebih memilih cara manual karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap program ini. Selain itu faktor penghambat lainnya, yakni jadwal pembukaan antrian dan sidang yang tidak beriringan, hingga kurangnya koordinasi antara pengacara dengan pihak pengadilan terkait dengan konfirmasi mengenai perkara antara pihak pengacara dengan pengadilan.¹⁶

Hal ini dapat disimpulkan bahwa penerapan *good governance* di Pengadilan Agama Blitar sudah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Didukung dengan inovasi-inovasi yang diciptakan. Namun ada sedikit hambatan dalam sarana penunjang perlengkapan terkait aplikasi yang harus disediakan satker masing-masing, *server* perlu di *upgrade*, hingga kesiapan masyarakat dalam teknologi kurang. Hal ini berdampak terhadap *e-litigasi* di Pengadilan Agama Blitar yang penerapannya masih jarang. Selain itu jadwal pembukaan antrian dan sidang yang tidak beriringan, hingga kurangnya koordinasi antara pengacara dengan pihak pengadilan terkait dengan konfirmasi mengenai perkara antara pihak pengacara dengan pengadilan.

¹² Hermina Rusdiana dan Nur Cholis Ahwan, *Wawancara*, (Blitar, 14 April 2020).

¹³ Nur Cholis Ahwan dan Taryono Reksowardoyo, *Wawancara*, (Blitar, 14 April 2020).

¹⁴ Hermina Rusdiana, *Wawancara*, (Blitar, 14 April 2020).

¹⁵ Nur Cholis Ahwan, *Wawancara*, (Blitar, 14 April 2020).

¹⁶ Siti Asanah, *Wawancara*, (Blitar, 15 April 2020).

Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Layanan Administratif di Pengadilan Agama Blitar

Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan merupakan asas peradilan yang harus diterapkan semua lembaga peradilan. Asas bahwa beracara di pengadilan harus sederhana, cepat, dan biaya ringan termuat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sederhana berarti perkara dilakukan secara efisien dan efektif. Asas cepat, asas yang bersifat universal, berkaitan dengan waktu penyelesaian yang tidak berlarut-larut. Asas cepat ini terkenal dengan *adagium justice delayed justice denied*, bermakna proses peradilan yang lambat tidak akan memberi keadilan kepada para pihak. Sedangkan biaya ringan adalah biaya yang dapat dijangkau oleh masyarakat Menurut Mukti Arto, yang dimaksud dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah dalam proses acara persidangan yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit, tidak terlalu banyak formalitas yang merupakan hambatan bagi jalannya peradilan sehingga penyelesaian perkara tidak memakan waktu yang lama dan tidak dibutuhkan biaya lain kecuali benar-benar diperlukan secara riil untuk penyelesaian perkara. Biaya harus ada tarif yang jelas dan seringan-ringannya. Segala pembayaran di pengadilan harus jelas kegunaannya dan diberi tanda terima uang.¹⁷ Namun jika ditelaah lebih jauh lagi mengenai asas tersebut, tidak hanya seputar persidangan saja namun mencakup keseluruhan pelayanan proses berperkara sehingga dalam pelayanan dapat berjalan dengan maksimal..

Di dalam lembaga Pengadilan Agama Blitar sendiri, penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat dilihat dari pelayanan yang diberikan. Seperti penerapan program Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) mulai dari pendaftaran hingga pengambilan produk putusan, kemudian mesin pembayaran untuk membayar biaya panjar perkara, hingga keperluan legalisasi dari pos yang menjadikan pelayanan menjadi sederhana karena semua pelayanan menjadi satu tempat yakni di Pengadilan Agama Blitar, hal ini menunjukkan penerapan dari asas sederhana. Selanjutnya penerapan asas cepat dapat dilihat pada proses pendaftaran hingga mendapatkan nomor persidangan dapat dilakukan dalam satu hari sehingga menghemat waktu para pihak, namun tanpa mengorbankan ketelitian untuk mencari kebenaran dan keadilan. Pengadilan Agama Blitar juga menerapkan program pelayanan perkara prodeo khusus instansi selain dari anggaran yang telah diberikan oleh negara dengan menunjukkann SKTM dari desa dan diketahui pihak kecamatan, hal ini menunjukkan penerapan dari asas biaya ringan. Untuk biaya panjar disetarakan dengan wilayah yang sama biasanya ditentukan oleh masing-masing satuan kerja. Rincian daftar biaya panjar dapat dilihat di papan informasi atau petugas yang bersangkutan di pengadilan.¹⁸

Dari penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama Blitar ada sedikit kendala yang dialami diantaranya dari segi pihak berperkara ngotot ingin dilayani meski berkasnya kurang lengkap dan meminta informasi terlalu lama sehingga mengganggu antrian, hingga penundaan jadwal sidang atau pengunduran waktu sidang dari jadwal yang telah ditentukan. Meskipun demikian, dalam hal pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan harus tetap teliti dan cermat dalam mencari kebenaran dan keadilan.¹⁹ Hal ini dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya asas

¹⁷ Mukti Arto, *Mencari Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001), 67.

¹⁸ Hermina Rusdiana dan Taryono Reksowardoyo, *Wawancara*, (Blitar, 14 April 2020).

¹⁹ Suyadi dan Hermina Rusdiana, *Wawancara*, (Blitar, 14 -15 April 2020).

seederhana, cepat, dan biaya ringan telah diterapkan di pengadilan Agama Blitar, meskipun ada sedikit kendala namun hal ini merupakan sesuatu yang wajar dari penerapan suatu program.

Dengan diterapkannya *good governance* di Pengadilan Agama Blitar dapat dipahami secara luas maka asas peradilan akan tercapai karena *good governance* dan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan pada dasarnya memiliki tujuan yang senada yakni untuk memberikan pelayanan yang optimal dan sesuai prosedur terhadap pihak berperkara.

Kesimpulan

Pertama, Implementasi *Good Governance* di Pengadilan Agama Blitar melalui Layanan Administratif tetaplah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang meliputi unsur kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan wewenang, keterbukaan, kepetingan umum, dan pelayanan yang baik. Adapun penerapan *good governance* ini didukung inovasi-inovasi di bidang pelayanan baik yang dikelurkan oleh Pengadilan Agama Blitar maupun Mahkamah Agung yang berguna untuk meningkatkan pelayanan yang optimal sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. *Kedua*, Pelaksanaan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama Blitar sebenarnya telah sesuai dengan yang tertera dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Korelasi dengan diterapkannya *good governance* di Pengadilan Agama Blitar dapat dipahami secara luas maka asas peradilan akan tercapai karena *good governance* dan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan pada dasarnya memiliki tujuan yang senada yakni untuk memberikan pelayanan yang optimal dan sesuai prosedur terhadap pihak berperkara di Pengadilan Agama Blitar.

Daftar Pustaka:

Buku

- Ali, Zainuddin . Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
Arto, Mukti. Mencari Keadilan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
Dwiyanto, Agus dkk., Mewujudkan *Good Governance* Melalui Pelayanan Publik.
Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008.
Soekanto, Soerjono . Penelitian Hukum Normatif . Jakarta: Raja Grafindo, 2003.

Skripsi

- Spaltani, Bitu Gadsia. "Peran Peradilan TUN dalam Penyelenggaraan Good Governance Pasca UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan", Undergraduate thesis, Universitas Muhammdiyah Surakarta, 2016.
<http://eprints.ums.ac.id/49800/>
- Ikhsan, A Muh W R. "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governanace dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa (Studi Desa Pesse, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng)". Undergraduate thesis Universitas Hasanuddin, 2017.
<http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/6/>
- Mardiansyah, Anton Kurnia. "Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Menurut Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Fiqh Siyasa (Studi Pengadilan Agama Kalianda)". Undergraduate

thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.
<http://repository.radenintan.ac.id/5656/1/>

Irani, Delfiana MS. "Penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Beracara di pengadilan Negeri Kelas IB Bukittinggi,". Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau, 2018. <http://repository.uin-suska.ac.id/18770/>

Website

Mansyur, Ridwan, "Pelayanan Publik", diakses 26 November 2019,
https://www.mahkamahagung.go.id/assets/majalah/Majalah_MA_Edisi3/majalah/assets/basic-html/page64.html

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Blitar, diakses 17 Maret 2020, https://sipp.pa-blitar.go.id/statistik_perkara